



Implementasi Kebijakan Penerimaan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Di Universitas Muhammadiyah Jakarta

Rani Fransiska Chrisdayanti¹, Izzatusholekha²

^{1,2,3}Universitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received April 8, 2026
Revised April 8, 2026
Accepted April 13, 2026

Kata Kunci:

Implementasi kebijakan,
KIP Kuliah,
Universitas Muhammadiyah
Jakarta,

Keywords:

Implementasi kebijakan,
KIP Kuliah,
Universitas Muhammadiyah
Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program KIP Kuliah di UMJ berdasarkan model Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Standar dan Sasaran Kebijakan telah dipahami dengan baik oleh pihak universitas melalui SOP dan SK Rektor, meskipun masih terdapat keluhan mahasiswa tentang ketidaktepatan sasaran penerima. (2) Sumber Daya telah memadai, baik dari aspek SDM maupun teknologi, tetapi masih ditemukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan regulasi nasional. (3) Komunikasi Antar Lembaga telah terbangun melalui jalur internal dan eksternal, namun belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau mahasiswa secara merata. (4) Karakteristik Agen Pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi, meskipun mahasiswa menilai pelayanan belum sepenuhnya empatik. (5) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik sangat memengaruhi pelaksanaan, dan perbedaan persepsi antara pihak kampus dan mahasiswa menandakan perlunya perbaikan verifikasi. (6) Disposisi Implementor menunjukkan dukungan moral dan kelembagaan yang kuat, tetapi tindak lanjut hasil evaluasi dinilai belum maksimal. Dengan demikian, implementasi program KIP Kuliah di UMJ telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek ketepatan sasaran, koordinasi internal, serta penyesuaian kebijakan kampus dengan regulasi nasional.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the KIP Kuliah policy at UMJ using the Van Meter and Van Horn implementation model. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings show that: (1) Policy Standards and Objectives have been well understood by the university through the establishment of Standard Operating Procedures and Rector's Decrees, although students reported concerns about the accuracy of target beneficiaries. (2) Resources are adequate in terms of human resources and technology, but the existence of fees not aligned with national regulations was identified. (3) Inter-organizational Communication is present through internal and external channels but has yet to optimally reach all students equally. (4) Characteristics of Implementing Agents reflect strong commitment and integrity, though students noted that services could be more empathetic, especially during the registration process. (5) Social, Economic, and Political Conditions significantly affect implementation, with differing perceptions between the university and students suggesting a need for improved data verification. (6) Implementers' Disposition shows moral and institutional support for the program, although follow-up on evaluation results is still lacking. In conclusion, while the KIP Kuliah

implementation at UMJ is generally well-executed, improvements are needed in targeting accuracy, internal coordination, and alignment with national regulations.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Rani Fransiska Chrisdayanti
Universitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta,
Jakarta, Indonesia
Email: ranifransiskaaaaa@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, generasi muda dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan, dan meraih masa depan yang lebih baik. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam mengembangkan karakter individu, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan intelektual bangsa Indonesia. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, dan melalui pendidikan, setiap individu diharapkan mampu mengoptimalkan potensi diri mereka dalam proses pembelajaran. Hal ini penting karena setiap orang perlu memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian yang baik, spiritualitas, pengendalian diri, dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pendidikan menjadi faktor esensial bagi masyarakat, mengingat bahwa kualitas pendidikan sebuah bangsa sangat bergantung pada tingkat pendidikan yang ada di negara tersebut [1].

Dalam mengakses pendidikan khususnya perguruan tinggi terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dapat bersifat ekonomi, sosial maupun struktural. Yang menjadi hambatan terbesar dalam akses pendidikan ke perguruan tinggi salah satunya adalah ekonomi atau kemiskinan [2]. Keterbatasan ekonomi yang membuat banyak keluarga miskin tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke pendidikan yang lebih tinggi. Biaya kuliah yang tinggi, biaya hidup, serta kebutuhan pendukung seperti buku, transportasi, dan teknologi sering kali menjadi penghalang utama, terutama bagi keluarga miskin. Peran pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa sangatlah krusial, karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif yang harus didukung oleh kebijakan publik yang tepat [3]. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2), setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib membiayai pendidikan untuk setiap warga negara. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kesempatan belajar dan memenuhi kebutuhan terkait beasiswa.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, berbagai program dan kebijakan telah diluncurkan oleh pemerintah, termasuk pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dan kurang mampu. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) untuk meningkatkan akses dan kesetaraan dalam pendidikan tinggi sehingga terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Melalui KIP Kuliah ini juga pemerintah berupaya untuk memberikan dukungan bagi mahasiswa yang secara finansial kurang mampu tetapi memiliki prestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi [4]. Bantuan beasiswa ini dapat digunakan untuk memenuhi biaya kuliah dan kebutuhan akademis lainnya. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.

Dalam Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi pada Pasal 1 dijelaskan PIP atau Program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Kemudian program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang disingkat menjadi KIP Kuliah merupakan skema dari bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau keluarga rentan miskin. Bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tetapi berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin merupakan hal yang sangat sulit untuk mereka dapatkan. Banyak pelajar yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dikarenakan ketidakmampuan secara finansial, meskipun secara kemampuan akademik dan keinginan untuk menimba ilmu sangat mumpuni, maka dari itu program KIP Kuliah sangat dibutuhkan bagi pelajar yang memiliki potensi akademik cukup baik serta keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan, dengan program KIP Kuliah juga dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin [5].

Dilansir dari *puslapdik.kemendikbud.go.id* siswa yang saat ini bersekolah di SMA atau SMK dan sederajat memiliki KIP Dikdasmen adalah target utama penerima KIP Kuliah. Selain itu, juga menyasar calon siswa yang berasal dari keluarga yang terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH), pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau pemilik Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Tentunya, pendaftar KIP Kuliah harus lulus jalur seleksi dengan prodi yang memiliki akreditasi A, B atau akreditasi C dengan pertimbangan tertentu.

Penerimaan KIP Kuliah idealnya harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kriteria penerima KIP Kuliah, seperti latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu, harus menjadi acuan utama dalam menentukan siapa yang layak mendapatkan bantuan. Hal ini penting agar beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jika seleksi penerimaan dilakukan secara ketat dan berdasarkan data yang valid, maka program ini dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, KIP-Kuliah dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi serta meningkatkan prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik.

Selama pelaksanaan program KIP Kuliah, berbagai permasalahan masih kerap terjadi, salah satunya adalah ketidaktepatan sasaran penerima beasiswa. Meskipun program ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dari kalangan keluarga kurang mampu atau rentan miskin agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dalam praktiknya masih ditemukan masalah dimana beasiswa tersebut diterima oleh mahasiswa yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya kekurangan dalam proses seleksi dan verifikasi data, yang mengakibatkan bantuan tidak sepenuhnya tersalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan. Banyak penerima beasiswa KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran, dimana seharusnya beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, namun kenyataannya ada beberapa penerima yang justru berasal dari kalangan yang mampu secara ekonomi. Akibatnya, beasiswa tersebut terkadang digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup konsumtif dan hedonis [6].

Terjadinya masalah ketidaktepatan dalam penerimaan beasiswa yang berdampak pada efektivitas program itu sendiri. Pengimplementasian program beasiswa KIP-K menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya komunikasi informasi, ketidakpastian dalam pencairan dana, dan proses birokrasi yang rumit [7]. Untuk memastikan transparansi dalam proses seleksi dan menghindari masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat dua perspektif yang berbeda antara perguruan tinggi dan

mahasiswa. Melalui penelitian ini, peneliti ingin menganalisis sudut pandang yang berbeda dari pihak perguruan tinggi dan mahasiswa yang menerima manfaat dari beasiswa tersebut.

Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang dapat menyelenggarakan program beasiswa KIP Kuliah yang merupakan skema dari Program PIP yang ada pada Persekjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023. Peneliti telah melakukan observasi awal melalui kuisioner yang terdiri dari 6 pertanyaan terkait KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kuisioner tersebut telah di isi oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Berdasarkan hasil kuisioner yang diisi oleh mahasiswa terkait program beasiswa KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagian besar responden mengetahui adanya beasiswa KIP Kuliah, namun banyak yang menyatakan bahwa informasi terkait pendaftaran dan prosesnya masih kurang terbuka dan sulit diakses. Selain itu, terdapat pandangan umum bahwa penerima KIP Kuliah sering kali tidak tepat sasaran. Ada responden yang mengungkapkan bahwa penerima KIP Kuliah ada yang mampu secara finansial, bahkan menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan konsumtif, bukan pendidikan. Idealnya, beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar kurang mampu, sungguh-sungguh dalam perkuliahan, dan memanfaatkan beasiswa untuk mendukung studi mereka. Responden juga menyoroti pentingnya pengawasan lebih ketat dalam menyeleksi calon penerima agar beasiswa dapat tepat sasaran dan dapat membantu mahasiswa yang benar-benar memerlukan dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Sebagai mahasiswa memiliki peran yang penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat, termasuk dalam hal kebijakan publik, seperti program KIP Kuliah. Penelitian ini dilakukan untuk menyoroti keterlibatan mahasiswa dalam mengakses beasiswa tersebut, sekaligus mengkaji permasalahan implementasi kebijakan KIP Kuliah. Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan, sehingga program ini dapat lebih efektif dalam membantu mahasiswa yang benar-benar membutuhkan, dan mendukung peningkatan akses pendidikan tinggi yang berkeadilan.

2. METODE

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bersifat mendalam dan komprehensif, dirancang untuk memahami serta menjelaskan berbagai fenomena sosial atau budaya dengan mempertimbangkan konteks alaminya, sehingga peneliti dapat menggali perspektif, pengalaman, dan makna yang dihayati oleh individu atau kelompok dalam situasi tertentu, serta bagaimana interaksi dan faktor-faktor lingkungan mempengaruhi pemahaman mereka terhadap realitas yang ada (Rachman, 2024). Dalam penelitian ini, diterapkan metode analisis deskriptif yang secara khusus berfokus pada memberikan gambaran atau deskripsi yang mendetail tentang subjek penelitian, dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam nuansa, konteks, dan kompleksitas fenomena yang diteliti, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif mengenai aspek-aspek yang berpengaruh terhadap subjek tersebut [8].

Alasan digunakannya metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah dalam studi ini didasarkan pada kemampuannya untuk menghasilkan data keilmuan yang mendalam melalui wawancara dengan informan dalam konteks terkini. Hal ini sangat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dan terkait dengan pelaksanaan penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, penelitian ini berfokus pada studi kasus Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai objek penelitian, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek dan dinamika yang terdapat dalam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Fokus pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan penerimaan beasiswa KIP Kuliah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Studi kasus terkait bagaimana penerapan kebijakan KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2.2 Teknik Penentuan Informan

Melibatkan seluruh elemen dalam penelitian seringkali sulit karena memerlukan banyak waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan sampel, yaitu sejumlah elemen yang dipilih dari populasi, agar peneliti dapat menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Dengan demikian, sampel adalah sebagian dari populasi [9].

Pada penelitian kali ini penentuan informan disesuaikan dengan sumber data yang dibutuhkan. Adapun beberapa informan yang dibutuhkan yaitu Rektor UMJ, Bagian Kemahasiswaan UMJ, PMB UMJ, Mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah di UMJ, mahasiswa bukan penerima beasiswa KIP Kuliah, dan mahasiswa khusus. Dengan informan yang dipilih sesuai kebutuhan, selama mereka relevan dengan sumber data yang dibutuhkan [10].

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penting untuk memahami bagaimana teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat. Tiga metode utama yang akan digunakan oleh peneliti guna membantu peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang akan diambil adalah data yang memiliki hubungannya dengan implementasi kebijakan dan implikasi terhadap ketidaktepatan penerima beasiswa kip-k di universitas muhammadiyah jakarta.

2.4 Teknik Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk dapat menarik kesimpulan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan dan merangkum data dengan menyeleksi informasi penting dan membuang data yang kurang relevan. Hal ini membantu peneliti untuk fokus pada inti permasalahan.

2. Penyajian Data

Data yang telah diringkas kemudian disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti diagram, grafik, atau narasi yang menjelaskan hubungan antar kategori.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa interpretasi dan hasil temuan sejalan dengan data yang telah dikumpulkan. Langkah-langkahnya meliputi memberikan umpan balik melalui diskusi dengan kolega atau ahli untuk memverifikasi interpretasi dan mendapatkan sudut pandang tambahan. Selain itu, kesimpulan disusun dengan merefleksikan proses analisis dan menghubungkannya kembali dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil penelitian yang telah dicapai.

2.5 Teknik Validasi Data

Penulis menggunakan triangulasi data untuk memastikan validasi data dalam penelitian ini. Triangulasi adalah teknik pengumpulan informasi yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber informasi yang tersedia. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai narasumber untuk mengidentifikasi kesesuaian informasi. Dalam praktiknya, peneliti sering kali menghadapi perbedaan data dari berbagai pihak, sehingga teknik ini membantu dalam menentukan data yang paling akurat dan dapat dipercaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Penerimaan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Di Universitas Muhammadiyah Jakarta

Implementasi kebijakan dimulai dengan merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menentukan lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, serta mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan tempat kebijakan tersebut akan diterapkan agar prosesnya berjalan secara efektif dan kontekstual.

Tujuan dari kebijakan Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, adalah untuk membantu biaya hidup, biaya pendidikan, dan atau biaya pengelolaan dalam rangka :

1. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa warna negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.
2. Meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik.
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan atau menempuh studi pada Perguruan Tinggi yang terkenadampak bencana alam atau konflik sosial dana tau
4. Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.

Guna memperluas akses dan menciptakan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Program ini bertujuan memberikan dukungan finansial kepada putra-putri bangsa agar mereka tetap memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan tinggi, meskipun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai institusi pendidikan tinggi menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah melalui pelaksanaan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan proses seleksi yang berbasis pada verifikasi administratif dan kelayakan penerima, serta tetap menjaga mutu pelayanan pendidikan. Melalui program ini, UMJ berupaya memberikan akses pendidikan yang merata bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat menempuh pendidikan tinggi secara layak dan berkualitas. Di Universitas Muhammadiyah Jakarta menggunakan Keputusan Rektor Nomor 889 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk mewujudkan efektivitas, kelancaran, serta efisiensi yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program beasiswa KIP Kuliah, diperlukan adanya regulasi internal yang bersifat operasional. Oleh karena itu, penetapan Keputusan Rektor mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program ini menjadi penting sebagai acuan formal dalam proses penyaluran beasiswa, agar seluruh tahapan dapat berjalan secara tertib, terstruktur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program beasiswa KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta ditujukan bagi mahasiswa baru yang telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan berasal dari lulusan pendidikan menengah, seperti SMA, SMK, MA, MAK, maupun pesantren, dengan masa kelulusan maksimal dua tahun sebelum tahun akademik berjalan. Calon penerima diharuskan memiliki prestasi akademik dan tergolong dalam keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Tujuan utama program ini adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi secara adil dan merata. Pengelolaan teknis dan administratif beasiswa ini berada di bawah koordinasi Bagian Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang bertanggung jawab dalam proses seleksi, pendataan, serta pelaporan penerima beasiswa. Dengan adanya program ini, diharapkan mahasiswa yang memenuhi kriteria dapat terbantu secara finansial dan tetap melanjutkan pendidikan tanpa hambatan ekonomi.

Pembahasan pada penelitian ini berdasarkan fakta serta data yang ada di lapangan dan disesuaikan dengan teori yang digunakan. Hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan : 1) Wakil Rektor IV 2) Operator KIP Kuliah UMJ 3) UPT dan PMB UMJ 4) Mahasiswa penerima Beasiswa KIP Kuliah UMJ 5) Mahasiswa Khusus (Presiden mahasiswa BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta)..

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan penerimaan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Analisis dilakukan berdasarkan data hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, pembahasan penelitian ini menggunakan 6 indikator dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975). Hasil temuan penelitian dijelaskan secara rinci sesuai dengan masing-masing indikator.

3.2 Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), indikator pertama dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas. Dalam hal ini, para pelaksana kebijakan perlu memahami secara tepat tujuan serta tolak ukur dari kebijakan yang dijalankan, kejelasan standar dan sasaran penting agar proses implementasi tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di antara pelaksana, sehingga kebijakan dapat dijalankan secara konsisten, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁ terkait pemahaman universitas terhadap tujuan dari program KIP Kuliah, bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki pemahaman yang cukup mendalam terhadap tujuan program KIP Kuliah, terutama dalam hal penyaluran bantuan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki prestasi. Pihak universitas telah menerima sosialisasi secara resmi dari Kementerian Pendidikan dan LLDIKTI Wilayah III sebelum pelaksanaan program, termasuk pemaparan regulasi, hak dan kewajiban perguruan tinggi, serta mekanisme teknis penyaluran beasiswa. Untuk mendukung pelaksanaan program, universitas juga telah membentuk unit khusus pengelola KIP Kuliah serta menugaskan operator terdaftar yang bertugas menangani proses administrasi yang berada dibawah naungan Wakil Rektor IV Bidang Kemahasiswaan.

Dalam penjelasan I₁ dan I₂ bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan program beasiswa KIP Kuliah. SOP ini disusun secara sistematis dan ditandatangani oleh Rektor, sehingga memiliki legitimasi sebagai acuan kerja formal bagi unit pelaksana program, khususnya bagian kemahasiswaan dan operator KIP Kuliah di lingkungan kampus. Kehadiran SOP ini tidak hanya menjadi panduan teknis dalam proses seleksi dan penyaluran beasiswa, tetapi juga mencerminkan komitmen universitas terhadap prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan. Informasi dari kedua informan menunjukkan bahwa SOP tersebut berfungsi untuk memastikan agar seluruh tahapan program, mulai dari verifikasi hingga pencairan dana, berjalan sesuai dengan ketentuan dan sasaran kebijakan nasional. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan implementasi program KIP Kuliah di UMJ dapat dilakukan secara tertib, terarah, serta menghindari penyimpangan prosedur. SOP atau petunjuk teknis program beasiswa KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta tertuang pada Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 889 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2024/2025.

Selanjutnya melalui hasil wawancara dengan I₃, juga dapat diketahui bahwa pelaksanaan program KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta telah didukung oleh SOP atau petunjuk teknis yang disusun melalui koordinasi dengan bagian kemahasiswaan. Selain itu, pelaksanaan program juga mengacu pada pedoman umum dari Kemendikbudristek yang tersedia melalui situs resmi kementerian. Informasi ini mempertegas bahwa UMJ telah memiliki acuan administratif yang lengkap dan terstruktur

untuk menjamin pelaksanaan program berjalan sesuai dengan peraturan dan standar nasional yang berlaku. Hal ini mencerminkan keseriusan universitas dalam memastikan implementasi kebijakan dilakukan secara sistematis.

Universitas Muhammadiyah Jakarta juga telah menyediakan pedoman pendaftaran beasiswa KIP Kuliah melalui laman resmi yang terintegrasi langsung dengan situs KIP Kuliah milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keberadaan pedoman ini menunjukkan bahwa universitas telah menetapkan standar prosedural yang jelas sebagai acuan dalam proses seleksi dan pendaftaran, yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dan sasaran utama program, yakni mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.

Sasaran penerimaan beasiswa KIP Kuliah juga merupakan elemen penting yang menentukan efektivitas dan keberpihakan program terhadap sasaran yang dimaksud. Beasiswa ini dirancang untuk menjangkau mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki semangat dan potensi akademik yang baik. Dengan demikian, sasaran kebijakan program beasiswa KIP Kuliah terletak pada aspek kebutuhan finansial, tetapi juga memperhatikan prestasi dan komitmen belajar penerima manfaat, guna mewujudkan akses pendidikan tinggi yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan I₂ memberikan gambaran bahwa sasaran penerima dari program beasiswa KIP Kuliah adalah sebagai bentuk kebijakan afirmatif pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, terutama dalam meringankan beban biaya pendidikan dan kebutuhan hidup selama masa studi, artinya menurut I₂ sasaran beasiswa KIP Kuliah di UMJ sudah tepat dan sangat berdampak baik bagi penerimanya.

I₂ dalam hasil wawancara diatas menyatakan bahwa KIP Kuliah sangat membantu mahasiswa dari segi finansial, namun masih terdapat tantangan terkait pemanfaatannya oleh penerima. Beberapa mahasiswa dinilai kurang bertanggung jawab dalam memanfaatkan bantuan tersebut, sehingga tidak menyelesaikan studi tepat waktu. Meski demikian, Universitas Muhammadiyah Jakarta dinilai telah memahami sasaran kebijakan dengan baik, yaitu menyalurkan bantuan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan membutuhkan dukungan untuk mengakses pendidikan tinggi.

Akan tetapi ada perbedaan persepsi dari hasil wawancara dengan mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah yang menilai bahwa masih ada penerima beasiswa KIP Kuliah yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan menunjukan adanya ketidaktepatan sasaran dalam implementasi program. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan dalam proses seleksi agar bantuan dapat tepat sasaran diterima oleh mahasiswa yang benar-benar memenuhi syarat, yakni berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki prestasi akademik yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa penerima KIP Kuliah dan I₂, ditemukan adanya perbedaan persepsi terkait ketepatan sasaran penerima beasiswa. I₂ menilai bahwa program KIP Kuliah telah membantu mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan pelaksanaannya berjalan sesuai sasaran. Namun, dari sisi mahasiswa penerima KIP Kuliah, muncul keluhan mengenai ketidakadilan dan kurangnya transparansi, khususnya pada proses seleksi dan distribusi. Mahasiswa menyampaikan bahwa terdapat penerima yang secara ekonomi tergolong mampu, serta adanya praktik pungutan pada jalur kolektif yang tidak disertai kejelasan penggunaan dana, yang menimbulkan kesenjangan dan rasa ketidakadilan dalam implementasi program. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif pelaksanaan dianggap baik, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan yang perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam hal verifikasi ekonomi, transparansi proses, dan keadilan distribusi.

3.3 Sumber Daya

Dalam pandangan Van Meter dan Van Horn (1975), sumber daya merupakan salah satu faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebuah program, meskipun dirancang dengan baik,

tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia, keuangan, maupun sarana pendukung lainnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara desain kebijakan dan kapasitas sumber daya sangat diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁ bahwa dari sisi sumber daya manusia, Universitas Muhammadiyah Jakarta dinilai telah memiliki struktur dan kapasitas yang memadai dalam pengelolaan program KIP Kuliah. Terdapat dua staf khusus yang menangani program ini secara fokus di bawah koordinasi kepala bagian kemahasiswaan, serta satu orang operator yang terdaftar secara resmi di Kementerian. Operator ini secara rutin mengikuti pelatihan dan pembekalan dari pihak kementerian, sehingga selalu mendapatkan informasi terkini mengenai sistem dan prosedur pengelolaan beasiswa. Proses implementasi dari tahap pengajuan hingga penetapan penerima KIP Kuliah dikatakan berjalan sesuai prosedur tanpa kendala yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tersedia telah bekerja secara optimal dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta menjamin kelancaran administratif dalam proses seleksi dan distribusi beasiswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kapasitas SDM yang dimiliki UMJ telah cukup memadai untuk menjalankan implementasi program KIP Kuliah secara efisien.

Selanjutnya hasil wawancara dengan I₂ dan I₃ mengungkapkan hal yang selaras bahwa pelaksanaan program KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta telah didukung oleh kesiapan sumber daya manusia yang cukup baik dan sistem koordinasi yang terstruktur. Informan 2 menegaskan bahwa UMJ memiliki satu operator resmi yang menangani teknis pelaksanaan KIP dan secara aktif berkoordinasi dengan LLDIKTI Wilayah III melalui forum atau grup operator, sehingga jika terjadi kendala teknis dapat segera diatasi.

Sementara itu, I₃ menambahkan bahwa tidak hanya bagian kemahasiswaan, tetapi juga bagian Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) telah menunjuk personel khusus untuk menangani kelengkapan administrasi dan validasi awal calon penerima KIP. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program KIP Kuliah di UMJ bersifat kolaboratif antarunit kerja, serta telah memiliki pembagian tugas yang jelas mulai dari tahap pendaftaran hingga proses verifikasi dan penetapan, sehingga mendukung kelancaran implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Dalam konteks indikator sumber daya pada implementasi kebijakan, aspek pendanaan termasuk sebagai bagian integral dari keberhasilan program. Ini mencakup ketersediaan anggaran, alur pencairan dana, serta distribusinya dari pemerintah pusat hingga ke perguruan tinggi dan mahasiswa penerima. Proses pencairan dana harus terstruktur, transparan, dan tepat waktu agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program KIP Kuliah. Oleh karena itu, manajemen anggaran dan mekanisme penyaluran dana merupakan bagian penting dari dimensi sumber daya yang harus diperhatikan. Proses pencairan dana yang turun dari kementerian juga bisa dipantau langsung oleh mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah melalui web KIP Kuliah Kementerian Pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁ diketahui bahwa proses pencairan dana program KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta berjalan secara sistematis dan relatif lancar. Dana pendidikan mahasiswa penerima beasiswa ditransfer langsung oleh pemerintah ke rekening resmi universitas sesuai dengan jumlah dan akreditasi program studi masing-masing. Sementara itu, dana bantuan biaya hidup disalurkan langsung ke rekening pribadi mahasiswa melalui Bank BTN, tanpa melalui pihak kampus. Meskipun proses transfer terkadang mengalami keterlambatan karena faktor administratif negara, secara keseluruhan mekanisme pencairan dana berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan kendala yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengelolaan anggaran sebagai bagian dari sumber daya telah terimplementasi dengan baik di UMJ.

Lebih lanjut lagi dari hasil wawancara dengan mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah, diketahui bahwa keterlambatan pencairan dana biaya hidup atau uang saku kerap terjadi, dan salah satu penyebab utamanya berasal dari kelalaian mahasiswa itu sendiri dalam memenuhi kewajiban

administratif. Salah satunya adalah keterlambatan dalam mengisi formulir evaluasi (Google Form) yang menjadi bagian dari prosedur penyaluran dana. Hal ini menunjukkan bahwa selain kesiapan sistem dan kebijakan dari pihak kampus maupun pemerintah, partisipasi aktif dan kedisiplinan mahasiswa juga berperan penting dalam menjamin kelancaran pencairan dana beasiswa. Dengan demikian, permasalahan pencairan tidak selalu bersumber dari sisi birokrasi, melainkan juga dipengaruhi oleh kepatuhan mahasiswa terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Tidak hanya itu, berdasarkan dari penjelasan dari wawancara dengan I₂ menegaskan bahwa salah satu penyebab keterlambatan pencairan dana KIP Kuliah, khususnya dana biaya hidup, disebabkan oleh keterlambatan respon dari mahasiswa penerima beasiswa dalam mengisi formulir evaluasi (Google Form) yang menjadi syarat administratif pencairan dana. Setiap akhir semester, pihak pengelola mengirimkan formulir tersebut untuk mengumpulkan data penting seperti IPK dan status keberlanjutan studi mahasiswa. Namun, respons yang lambat dari mahasiswa, terutama dalam menyampaikan nilai akademik, menyebabkan keterlambatan laporan ke LLDIKTI, yang berdampak pada terhambatnya proses pencairan dana dari pusat. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin dan partisipasi aktif mahasiswa menjadi faktor krusial dalam kelancaran implementasi program KIP Kuliah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan juga, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan kebijakan internal Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dalam implementasi program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ketidaksesuaian ini muncul dalam aspek pembiayaan mahasiswa baru penerima beasiswa, yang secara substansi bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, khususnya pada Bab III bagian C poin 7 hingga 12, dijelaskan bahwa bantuan biaya pendidikan disalurkan langsung ke rekening perguruan tinggi dan hanya boleh digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Lebih lanjut, pasal 10 secara tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak diperbolehkan memungut biaya tambahan apa pun yang terkait dengan operasional pendidikan penerima KIP Kuliah. Dalam pasal 12 juga dijelaskan bahwa apabila perguruan tinggi telah memungut biaya pendaftaran atau biaya operasional lainnya baik sebelum maupun sesudah pencairan bantuan, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada mahasiswa penerima beasiswa.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengatur ketentuan pembiayaan awal semester bagi mahasiswa baru penerima KIP Kuliah, ditemukan bahwa mahasiswa tetap dibebankan sejumlah biaya pada termin pertama. Biaya tersebut meliputi: jas almamater hijau (UMJ) dan merah (IMM) sebesar Rp350.000, program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) sebesar Rp200.000, pembuatan kartu tanda mahasiswa dan ATM sebesar Rp250.000, dana kemahasiswaan sebesar Rp150.000, infak persyarikatan Muhammadiyah sebesar Rp150.000, infak pembangunan masjid sebesar Rp100.000, dana kesehatan sebesar Rp100.000, dan biaya Baitul Arqam Mahasiswa sebesar Rp200.000. Total keseluruhan pembayaran mencapai Rp1.500.000.

Berdasarkan klasifikasi jenis pembiayaan dalam regulasi nasional, sebagian besar komponen biaya yang dibebankan tersebut tidak tergolong sebagai biaya operasional pendidikan yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Bahkan, terdapat item yang bersifat non-akademik atau personal, seperti infak, kesehatan, dan atribut kelembagaan, yang secara prinsip tidak seharusnya menjadi beban bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Lebih lanjut, tidak ditemukan informasi atau dokumen resmi yang menunjukkan bahwa biaya tersebut telah dikecualikan atau dikembalikan kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan program KIP Kuliah di UMJ dengan prinsip dan standar nasional yang

menekankan asas keadilan, aksesibilitas, dan non-diskriminasi terhadap mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun UMJ telah menjalankan program KIP Kuliah secara umum sesuai prosedur, terdapat aspek kebijakan internal khususnya dalam pengelolaan pembiayaan awal yang belum sepenuhnya sejalan dengan regulasi nasional. Hal ini menjadi perhatian penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan konsistensi implementasi kebijakan beasiswa KIP Kuliah di tingkat perguruan tinggi.

Dalam konteks indikator kedua yaitu sumber daya, aspek infrastruktur teknologi informasi menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung implementasi kebijakan secara efektif. Universitas Muhammadiyah Jakarta telah menyediakan sarana infrastruktur berupa website resmi yang dapat diakses oleh seluruh calon mahasiswa baru. Website ini memuat informasi penting mengenai program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, termasuk prosedur pendaftaran, syarat penerimaan, serta alur seleksi. Kehadiran platform digital ini menunjukkan bahwa UMJ telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Dengan demikian, infrastruktur digital yang tersedia berperan sebagai sumber daya pendukung yang strategis dalam mendukung kelancaran implementasi kebijakan beasiswa KIP Kuliah secara transparan dan informatif

3.4 Komunikasi Antar Lembaga

Dalam teori implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), komunikasi antar lembaga merupakan salah satu indikator yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Komunikasi yang terstruktur, jelas, dan konsisten di antara para pelaksana kebijakan dapat meminimalisir kesalahpahaman, perbedaan interpretasi, serta konflik tujuan. Dengan adanya koordinasi yang baik selama proses implementasi, setiap pelaksana dapat memahami peran dan tanggung jawabnya secara tepat, sehingga mendukung tercapainya efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Pelaksanaan program beasiswa KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta menunjukkan adanya dua jalur komunikasi yang berjalan, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal mencakup interaksi antara bagian Kemahasiswaan, PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru), dan mahasiswa penerima beasiswa. Jalur ini bertujuan memastikan penyampaian informasi, sosialisasi program, serta pengelolaan administratif berjalan efektif di lingkungan kampus.

Sementara itu, komunikasi eksternal melibatkan koordinasi antara UMJ dan pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pemilik kebijakan. Komunikasi ini dilakukan melalui operator yang ditunjuk secara resmi oleh universitas untuk menjembatani informasi teknis dan administratif, termasuk pelaporan dan pembaruan kebijakan dari kementerian. Hubungan ini juga diperkuat melalui keikutsertaan operator dalam forum resmi bersama LLDIKTI Wilayah III, yang difasilitasi untuk mendiskusikan kendala dan pembaruan program. Dengan adanya jalur komunikasi yang terstruktur tersebut, UMJ berupaya menjaga sinkronisasi pelaksanaan program sesuai ketentuan nasional.

Dalam wawancara dengan I₁ menjelaskan komunikasi dalam pelaksanaan program KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dibangun melalui dua jalur utama, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal melibatkan hubungan antara bagian kemahasiswaan dan mahasiswa penerima beasiswa yang dikelola secara intensif melalui grup WhatsApp. Melalui grup ini, mahasiswa mendapatkan informasi terkait kelengkapan administrasi, proses pencairan dana, hingga kewajiban akademik seperti pelaporan indeks prestasi dan keaktifan. Selain itu, bagian kemahasiswaan juga rutin melakukan briefing dan pengawasan terhadap mahasiswa untuk memastikan mereka menjalankan tanggung jawabnya sebagai penerima beasiswa, termasuk lulus tepat waktu dan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.

Sementara itu, komunikasi eksternal dilakukan antara pihak universitas dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai penyelenggara program. Bagian kemahasiswaan UMJ secara berkala melakukan pelaporan dan koordinasi terkait kuota, data penerima, dan hasil evaluasi ke kementerian. Bahkan, UMJ juga menerima monitoring dan evaluasi langsung dari Kementerian serta LLDIKTI wilayah III. Melalui sistem yang berjenjang ini, pemerintah pusat dapat mengecek keaktifan dan akuntabilitas data penerima melalui pangkalan data PDDIKTI. Dengan demikian, pola komunikasi dua arah ini menjadi elemen penting dalam memastikan implementasi program KIP Kuliah berjalan efektif dan sesuai sasaran di lingkungan UMJ.

Selanjutnya dalam wawancara dengan I₁ ditegaskan bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) secara aktif melakukan sosialisasi program beasiswa KIP Kuliah melalui berbagai media dan strategi. Sosialisasi dilakukan dalam tiga bentuk utama, yaitu saat promosi ke sekolah-sekolah, melalui distribusi brosur yang memuat informasi tentang berbagai jenis beasiswa termasuk KIP Kuliah, serta melalui website PMB UMJ setelah kuota resmi dari Kementerian diterbitkan. Informan juga menjelaskan bahwa tidak semua kampus bersedia menerima KIP karena nilai bantuan dari pemerintah dianggap tidak mencukupi biaya kuliah, namun UMJ tetap berkomitmen menyalurkan bantuan tersebut meskipun harus menutupi selisih biaya dari dana internal. Selain itu, jumlah kuota KIP Kuliah setiap tahun bervariasi tergantung pada penetapan dari LLDIKTI dan Kementerian, serta terdapat jalur tambahan dari aspirasi masyarakat yang tidak termasuk dalam kuota resmi pemerintah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa UMJ telah berupaya maksimal dalam menyebarluaskan informasi terkait program beasiswa KIP Kuliah dan berperan aktif dalam menyalurkan bantuan pendidikan tersebut secara inklusif dan berkeadilan.

Dalam proses implementasi kebijakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, komunikasi publik menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa informasi mengenai program dapat tersampaikan dengan baik kepada sasaran penerima manfaat. Universitas sebagai pelaksana teknis memiliki tanggung jawab untuk menjamin keterbukaan akses informasi, baik melalui kanal formal seperti website maupun pendekatan langsung kepada calon mahasiswa. Proses ini harus dikelola secara efektif agar tidak menimbulkan kesenjangan informasi yang dapat memengaruhi keikutsertaan atau pemahaman mahasiswa terhadap program.

Lebih lanjut lagi berdasarkan hasil wawancara dengan I₂ dan I₃, ditemukan adanya perbedaan persepsi terkait publikasi informasi beasiswa KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. I₂ menyatakan bahwa informasi mengenai program KIP telah dipublikasikan melalui website PMB UMJ dan kementerian, sehingga mudah diakses oleh calon mahasiswa. Namun, I₃ dari pihak PMB menyampaikan bahwa mereka tidak secara khusus membuat atau menyebarkan flyer terkait KIP Kuliah karena adanya kekhawatiran calon mahasiswa akan kecewa apabila tidak lolos seleksi. PMB hanya memberikan informasi secara pasif, yaitu jika ada pertanyaan langsung dari calon mahasiswa dan mengarahkan mereka untuk mengakses informasi melalui situs resmi kementerian. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam strategi komunikasi internal yang dapat memengaruhi keterjangkauan informasi kepada calon penerima beasiswa.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah UMJ, diketahui bahwa mayoritas dari mereka memperoleh informasi terkait program ini melalui jalur informal, seperti dari guru, alumni sekolah, teman dekat, hingga keluarga yang memiliki koneksi dengan pihak kampus atau lembaga lain. Hanya sebagian kecil yang menyatakan memperoleh informasi dari sumber resmi seperti media sosial Kemdikbudristek atau laman web pendaftaran. Temuan ini mencerminkan bahwa penyebaran informasi program KIP Kuliah di lingkungan UMJ belum berlangsung secara masif dan merata melalui kanal komunikasi resmi kampus. Minimnya sosialisasi secara langsung dan terbuka dapat berdampak pada terbatasnya akses mahasiswa potensial, terutama mereka yang berasal dari luar jaringan informal tersebut, terhadap peluang mendapatkan beasiswa ini. Dengan demikian, diperlukan evaluasi dan peningkatan strategi komunikasi publik dari pihak

universitas agar program KIP Kuliah dapat lebih dikenal luas dan menjangkau sasaran secara lebih adil dan inklusif.

3.5 Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), karakteristik agen pelaksana merupakan elemen penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, efektivitasnya sangat bergantung pada sikap, komitmen, dan kepedulian para pelaksana di lapangan. Apabila agen pelaksana menunjukkan sikap pasif, kurang peduli, atau tidak mendukung kebijakan, maka pelaksanaan program dapat terhambat dan tujuan kebijakan menjadi sulit tercapai, bahkan berpotensi gagal secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁ bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki staf pelaksana program KIP Kuliah yang dinilai memiliki integritas tinggi. Selama pengawasan yang dilakukan, belum ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh operator maupun staf yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Hal ini berbeda dengan kasus-kasus di beberapa perguruan tinggi lain, yang terindikasi melakukan pelanggaran seperti penggelapan dana beasiswa atau manipulasi data mahasiswa penerima.

UMJ menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kredibilitas pelaksanaan program KIP Kuliah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang ketat sejak awal. Peringatan secara langsung dari pihak pimpinan kepada pengelola beasiswa juga dilakukan secara berkala guna mencegah terjadinya praktik tidak etis seperti penarikan biaya pendaftaran ilegal atau penguasaan dana oleh pihak yang tidak berhak. Praktik-praktik tersebut dipastikan tidak terjadi di lingkungan UMJ, menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana di institusi ini telah memenuhi standar profesionalisme dan akuntabilitas yang diperlukan dalam implementasi kebijakan publik.

I₃ juga menjelaskan bahwa para staf program beasiswa KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta menunjukkan karakteristik yang responsif dan profesional. I₃ juga menyampaikan bahwa seluruh informasi mengenai pelaksanaan program beasiswa KIP Kuliah diperoleh secara terpusat dari bagian kemahasiswaan, yang menunjukkan adanya kejelasan alur koordinasi internal. Selain itu, pemahaman para staf terhadap informasi kebijakan yang bersifat teknis maupun administrative dinilai sudah relevan dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan. Hal ini mencerminkan bahwa staf sudah memiliki kompetensi serta keterpaduan peran dalam mengelola program beasiswa dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan I₂ juga bahwa karakteristik dari para staf pelaksana dalam implementasi program beasiswa KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi, yang salah satunya didukung oleh adanya pembekalan langsung dari Kemendikbudristek. Pembekalan ini diberikan secara kusus kepada operator atau penanggung jawab KIP Kuliah, sehingga mereka memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi, prosedur teknis, dan tanggung jawab pelaksanaan. Dengan adanya pelatihan tersebut, staf pelaksana di UMJ mampu menjalankan tugas secara akurat, terarah, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang terjadi.

Lebih lanjut lagi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah di UMJ, bahwa karakteristik staf pelaksana dalam program ini cukup beragam dan memberikan dampak langsung terhadap kualitas implementasi kebijakan. Sebagian mahasiswa mengatakan bahwa petugas atau operator yang menangani program KIP Kuliah sudah cukup responsif, khususnya dalam menangani kendala teknis seperti kesalahan tagihan atau pencairan dana, serta aktif dalam memberikan informasi melalui grup whatsapp.

Namun, sebagian lain merasa bahwa karakteristik dari staf pelaksana, khususnya dalam hal sikap, pelayanan, dan pemahaman terhadap kebutuhan mahasiswa, masih perlu ditingkatkan. Misalnya pada tahap awal pendaftaran, kurangnya koordinasi antara bagian kemahasiswaan, fakultas, dan mahasiswa

menyebabkan beberapa mahasiswa harus mengurus administrasi secara mandiri tanpa arahan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua staf pelaksana memiliki keterampilan pelayanan yang memadai, yang seharusnya menjadi bagian dari kompetensi dasar staf pelaksana program kebijakan publik.

Selanjutnya, terdapat juga keluhan terkait pendekatan komunikasi yang digunakan seperti adanya narasi yang bersifat mengancam terkait kemungkinan pencabutan beasiswa. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian staf belum sepenuhnya mengedepankan pendekatan empatik dan edukatif dalam menjalankan peran mereka. Padahal, karakteristik agen pelaksana yang ideal seharusnya mencakup kompetensi teknis, integritas, komunikasi yang baik, serta komitmen dalam membantu mahasiswa penerima manfaat secara profesional.

3.6 Kondisi Sosial, Konomi, dan Politik

Dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan tempat kebijakan diterapkan merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Faktor-faktor eksternal seperti dukungan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan keberpihakan actor politik atau pemangku kebijakan sangat memengaruhi efektivitas implementasi. Ketika lingkungan eksternal memberikan respons positif dan mendukung, maka proses implementasi akan lebih mudah dijalankan dan berpeluang besar mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁ bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kelayakan akhir penerima beasiswa KIP Kuliah. Proses seleksi dan verifikasi utama dilakukan secara langsung oleh sistem milik Kementerian melalui formulir daring yang diisi mandiri oleh calon penerima. Dalam formulir tersebut, mahasiswa diminta melampirkan informasi terkait kondisi ekonomi keluarga, tempat tinggal, jumlah tanggungan keluarga, dan bukti visual seperti foto rumah. Sistem akan memverifikasi kelayakan berdasarkan data tersebut, termasuk mendeteksi status pekerjaan orang tua, seperti PNS dengan golongan tertentu. UMJ hanya memproses lebih lanjut nama-nama yang telah dinyatakan lolos oleh sistem pusat dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh. Hal ini menjadikan proses validasi data sangat bergantung pada kejujuran mahasiswa dan akurasi sistem. Dengan demikian, meskipun UMJ mendukung pelaksanaan program, keterlibatannya terbatas pada tahap administratif setelah seleksi awal dari kementerian, yang pada akhirnya berdampak pada ketepatan sasaran penerima beasiswa.

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan tiga informan, ditemukan adanya perbedaan persepsi terkait pelaksanaan verifikasi kelayakan penerima beasiswa KIP Kuliah di UMJ. I₁ menyatakan bahwa verifikasi sepenuhnya dilakukan oleh sistem kementerian melalui formulir daring, sehingga pihak universitas hanya menerima hasil dari sistem tersebut. Sementara itu, I₂ dan I₃ menegaskan bahwa pihak universitas juga melakukan verifikasi mandiri, seperti pengecekan dokumen dan konfirmasi melalui telepon kepada orangtua calon penerima, serta peninjauan latar belakang pekerjaan dan penghasilan orangtua calon penerima, serta peninjauan latar belakang pekerjaan dan penghasilan keluarga. Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan prosedur antara pihak internal universitas mengenai sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab verifikasi dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran, khususnya dari aspek sosial dan ekonomi. Beberapa mahasiswa menyatakan bahwa mereka memang sangat membutuhkan bantuan beasiswa karena keterbatasan ekonomi, dan mengakui bahwa program ini sangat membantu keberlangsungan studi mereka di perguruan tinggi. Namun, banyak pula yang mengungkapkan keprihatinan atas penerima lain yang secara ekonomi tergolong mampu, namun tetap mendapatkan beasiswa.

Mahasiswa menilai bahwa kondisi seperti ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam proses seleksi dan verifikasi data. Ketidaktepatan sasaran disebabkan oleh lemahnya verifikasi latar belakang

sosial ekonomi calon penerima, kurangnya penelusuran faktual oleh pihak kampus, serta distribusi informasi yang belum merata. Informasi mengenai program KIP Kuliah dinilai hanya beredar di kalangan tertentu dan tidak disosialisasikan secara luas, sehingga banyak calon mahasiswa yang sebenarnya layak tetapi tidak memiliki akses informasi yang cukup.

Selain itu, terdapat pandangan bahwa proses seleksi cenderung tertutup, dan beberapa mahasiswa menyampaikan pengalaman terkait ketidakjelasan prosedur dan kurangnya transparansi. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan mahasiswa, terutama bagi mereka yang merasa lebih layak namun tidak mendapatkan akses terhadap beasiswa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan dinamika internal kampus memiliki pengaruh besar terhadap implementasi program, dan perlu adanya perbaikan menyeluruh dalam sistem verifikasi dan sosialisasi agar program ini benar-benar menjangkau mahasiswa yang membutuhkan secara objektif dan adil.

Ditemukan perbedaan lagi dari hasil wawancara dengan I₁ dan I₃, ditemukan adanya perbedaan pandangan terkait pengaruh kebijakan internal terhadap proses seleksi penerima beasiswa KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. I₁ menyatakan bahwa sejauh ini tidak terdapat dinamika internal yang signifikan memengaruhi proses seleksi, karena sistem pendaftaran terbuka bagi semua calon mahasiswa yang memenuhi syarat, dan seleksi dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi, menegaskan bahwa tidak ada konflik atau polemik yang berarti dalam proses tersebut.

Namun, I₃ menyampaikan bahwa kebijakan internal kampus berpengaruh, seperti pembatasan jumlah penerima KIP Kuliah pada program studi tertentu dikarenakan program studi tersebut terlalu banyak penerima beasiswa KIP Kuliah, dapat berdampak pada proses administrasi mahasiswa. Salah satu contohnya adalah pemindahan program studi yang mengharuskan mahasiswa mengganti NIM dan memperbarui data sistem. Meskipun perubahan tersebut dianggap bersifat teknis dan relatif mudah diatasi, hal ini menunjukkan adanya pengaruh kebijakan institusional terhadap aspek administratif dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, meskipun tidak bersifat substantif terhadap kelayakan penerima, dinamika internal tetap berperan dalam proses implementasi kebijakan secara teknis.

3.7 Disposisi Implementor

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam teori implementasi kebijakan, disposisi implementor adalah sikap dan komitmen pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang dijalankan. Disposisi yang positif, seperti dukungan, pemahaman yang baik, dan kesesuaian nilai dengan tujuan kebijakan, akan mendorong keberhasilan implementasi. Sebaliknya, jika pelaksana menunjukkan sikap kurang peduli atau tidak memahami kebijakan secara menyeluruh, maka pelaksanaan kebijakan berisiko tidak berjalan efektif.

Dalam wawancara dengan I₁ bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki komitmen yang tinggi terhadap implementasi program KIP Kuliah sebagai bagian dari kontribusi dalam mendukung kebijakan pemerintah. Komitmen tersebut tidak hanya tercermin dari kesediaan menerima dan menyalurkan beasiswa, tetapi juga dari inisiatif proaktif universitas seperti mengajukan kuota khusus untuk mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki keterbatasan ekonomi namun berpotensi secara akademik. I₁ juga menekankan bahwa sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah, UMJ tidak berorientasi semata-mata pada keuntungan finansial, melainkan menjunjung tinggi nilai-nilai berdirinya Muhammadiyah yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa disposisi implementor di lingkungan UMJ mencerminkan komitmen moral, sosial, dan ideologis terhadap asas keadilan dan pemerataan pendidikan.

Selanjutnya, I₁ menjelaskan bahwa UMJ juga telah menerapkan sistem evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan dalam pelaksanaan program beasiswa KIP Kuliah. Evaluasi dilakukan secara berkala pada setiap tahap, dimulai verifikasi berkas, penetapan melalui Surat Keputusan Rektor, hingga

pemantauan capaian akademik mahasiswa. Evaluasi ini melibatkan tim kemahasiswaan dan tim akademik, serta bertujuan memastikan bahwa penerima beasiswa memenuhi kewajiban, khususnya dalam mempertahankan prestasi akademik seperti Indeks Prestasi (IPK). Jika tidak tercapai, mahasiswa akan diberi peringatan dan berpotensi dihentikan bantuannya. Pendekatan ini mencerminkan upaya serius UMJ dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas program.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), muncul temuan signifikan bahwa proses seleksi saat ini masih memerlukan perbaikan untuk menjamin ketepatan sasaran. Mahasiswa menggarisbawahi bahwa seleksi yang "lebih ketat, jelas, dan terarah" sangat diperlukan agar program benar-benar membantu mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit khususnya mereka dari daerah terpencil atau keluarga berpendapatan rendah. Beberapa narasi juga menyoroti ketidaktahuan calon penerima terhadap prosedur pendaftaran, yang menimbulkan kesenjangan informasi dan berpotensi membuka peluang untuk penyalahgunaan.

Hal ini mencerminkan bahwa meski pelaksana memahami norma dan kelayakan program, sikap serta komitmen mereka dalam pengawasan dan pemantauan seleksi belum optimal. Sikap tanggap terhadap ketidaksempurnaan sistem seleksi dan minimnya tindak lanjut evaluatif memperlihatkan bahwa komitmen implementor perlu diperkuat. Disposisi positif seharusnya terlihat dari upaya terus-menerus menegakkan prosedur seleksi yang akuntabel, memastikan semua calon penerima melewati verifikasi ketat, serta memberi perhatian khusus terhadap mereka yang paling membutuhkan agar program memiliki efektivitas dan keadilan yang tinggi.

4. KESIMPULAN

Pertama, dari segi standar dan sasaran kebijakan, UMJ telah memiliki pemahaman yang baik melalui penyusunan SOP dan Keputusan Rektor, namun terdapat perbedaan persepsi mahasiswa terkait ketepatan sasaran sehingga proses seleksi dan verifikasi perlu diperkuat.

Kedua, pada aspek sumber daya, universitas telah didukung oleh SDM yang memadai dan infrastruktur digital seperti website, namun masih ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan internal kampus dan regulasi nasional, khususnya terkait pungutan biaya non-akademik.

Ketiga, dalam komunikasi antar organisasi, komunikasi internal dan eksternal telah terjalin, namun masih terbatas pada jalur informal. Sosialisasi formal melalui kanal resmi perlu ditingkatkan agar informasi lebih merata dan terakses luas.

Keempat, dari karakteristik agen pelaksana, pengelola program menunjukkan komitmen dan integritas, tetapi mahasiswa menilai pendekatan komunikasi masih kurang empatik, terutama saat proses awal pendaftaran.

Kelima, terkait kondisi sosial, ekonomi, dan politik, pelaksanaan program dipengaruhi oleh sistem seleksi dari pusat dan kondisi ekonomi mahasiswa. Diperlukan peran aktif kampus dalam mengevaluasi dan memverifikasi kelayakan secara sosial-ekonomi untuk menjaga keadilan.

Keenam, pada indikator disposisi implementor, UMJ menunjukkan komitmen tinggi terhadap kebijakan, namun masih diperlukan peningkatan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi agar program tidak hanya administratif, tetapi juga mendukung pemerataan akses pendidikan secara nyata.

REFERENSI

- [1] Ajeng, D. L., Difanda, D., Naila, A. A., Raihanah, G., & I, S. N. (2022). Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) Di Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*.
- [2] Yuli, U., Djunarto, & Sahetapy, W. (2024). Kemiskinan Perkotaan dan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 759-766.

- [3] Taufiqurokhman, T., Satispi, E., Izzatusholekha, I., Andriansyah, A., & Samudra, A. (2023). Kebijakan Pemerintah Memajukan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul. *Swatantra*, 189-206.
- [4] Febriyanto, S., Putri, A. D., Ardianty, D. I., & et.al. (2024). Penyalahgunaan Dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Dampaknya Terhadap Pendidikan di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 28-36.
- [5] Nurul, R. A., Arkanudin, Annisa, R. A., Nurul, A., Ovie, L. N., & Viktorius, H. (2024). Implementasi Kebijakan KIP KULiah Merdeka di Universitas Tanjungpura. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 58-68.
- [6] Ridho, S. A., Ganis, V. N., & Siti, N. W. (2024). Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus KIP-K Salah Sasaran di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum . *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 30-47.
- [7] Yusra, F., Sitorus, A., & HS, N. (2024). Analisis Kebijakan Kip-Kuliah: Tinjauan Kualitatif Terhadap Pengalaman Mahasiswa Universitas Malikussaleh Angkatan 2022. *Nusantara Journal of Multidisciplinary science*, 944-951.
- [8] Ringgo, S., Puput, I. R., Alexandra, H., & Dedi, T. (2023). Implementasi KIP Kuliah Pada MAhasiswa/I Universitas Palangkaraya. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*, 251-266.
- [9] Sena, W. P., & al, E. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- [10] Kaharuddin. (2021). Kualitatif : Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium : Jurnal Pendidikan*, 1-8.